

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TOBOLI PARIGI KECAMATAN PARIGI UTARA

Gita Farista¹, Sinta²

Universitas Tadulako

Email: gitazhirul26@gmail.com

Abstract

The Non-Smoking Area Policy (KTR) is one of the procedures in Bank Rakyat Indonesia, Toboli Branch Unit, North Parigi District. Efforts made by the Bank in implementing these policies include installing banners related to "Application of No Smoking Areas", monitoring bank security or security guards, providing information to customers who will smoke in the Bank area, and appeals to customers who are already smoking to immediately turn off the smoke. cigarettes or suggest smoking outdoors. Various efforts related to KTR compliance to date have not been optimal, therefore, this study aims to find out how the implementation of the KTR guidelines at the Bank Rakyat Indonesia unit Toboli Parigi, North Parigi District by using 4 aspects of George Edward III's theory, namely: resources, communication, disposition, and bureaucratic structures. Descriptive type is used in this study which provides an overview of the implementation of KTR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Toboli branch unit. Purposive techniques are used in determining informants. The results of the study explain that the implementation of KTR at BRI Toboli Branch Unit Parigi District based on the regulation of Parigi Moutong Regent Regulation No. 2 of 2015 concerning KTR has not gone well. Some of the causes are the communication and socialization factors regarding smoking-free regulations that have not been spread evenly to the public.

Keywords: communication, resources, disposition, bureaucratic structure

Abstrak

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu prosedur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam melaksanakan kebijakan tersebut antara lain: pemasangan spanduk terkait "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok", pemantauan security atau satpam bank, pemberian informasi kepada nasabah yang akan merokok di area Bank, dan imbauan kepada nasabah yang terlanjur merokok untuk segera mematikan asap rokoknya atau menyarankan merokok di luar ruangan. Berbagai upaya terkait kepatuhan KTR hingga saat ini belum optimal, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pedoman KTR di Bank Rakyat Indonesia unit Toboli Parigi Kecamatan Parigi Utara dengan menggunakan 4 aspek teori George Edward III yakni: sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe deskriptif digunakan dalam penelitian yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan KTR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit cabang Toboli. Teknik purposive digunakan dalam menentukan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi KTR di BRI Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2015 Tentang KTR belum berjalan dengan baik. Beberapa penyebabnya adalah faktor komunikasi serta sosialisasi mengenai peraturan bebas rokok belum tersebar secara merata kepada masyarakat.

Kata Kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi

PENDAHULUAN

Penempatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) khususnya di tempat umum adalah upaya yang dilakukan untuk memberi ataupun melindungi manusia/masyarakat agar terhindar dari

paparan asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini adalah tempat atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok (pemerintah Sulawesi Tengah, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terkait Kesehatan No. 36 Tahun 2009, bahwa pemerintah mewajibkan Kawasan Tanpa Rokok harus disediakan di beberapa titik/tempat yang dianggap sebagai fasilitas umum, antara lain: tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar berlangsung, tempat anak bermain, tempat peribadahan, kendaraan umum, perkantoran/tempat kerja, fasilitas umum lainnya.

Bank adalah perkantoran atau tempat kerja yang senantiasa mendapat pengunjung/customer yang datang dengan berbagai urusan yang patut mendapatkan pelayanan yang baik. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Toboli Kecamatan Parigi Utara adalah pusat pelayanan bidang jasa keuangan milik pemerintah terkait pengkreditan, penyimpanan, dan pengambilan uang. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan masyarakat dibidang keuangan, perbankan tersebut menjadi salah satu kawasan tanpa rokok sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2015 tentang KTR, pasal 2 disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati, meliputi Hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, perbankan, tempat wisata, dan sarana/fasilitas olahraga.

Sejak terbitnya peraturan Bupati tersebut, kebijakan ini belum terlaksana dengan baik, khususnya pada BRI Unit Toboli Parigi Kecamatan Parigi Utara. Hal tersebut berdasarkan observasi lokasi penelitian bahwa masih terdapat pihak internal yakni pegawai yang merokok pada area Bank Toboli. Selain itu, terlihat juga masyarakat yang mengantri diluar khususnya pria yang masih merokok pada lingkungan bank. Hal ini memberi gambaran bahwa masih ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi aturan terkait pelarangan merokok tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa penerapan sanksi tegas kepada pelanggar aturan belum terlaksana.

Analisis selanjutnya memakai teori Edward III dimana menghubungkan setiap aspek (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Pada aspek komunikasi dapat dilihat kurangnya sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, permasalahan lain pada BRI Unit Toboli Parigi yakni: (1). Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya rokok, (2). Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, (3). Belum tersedianya tempat khusus merokok, (4). Kurangnya kepedulian pegawai dan masyarakat baik yang merokok maupun tidak merokok terhadap lingkungan sekitar. Dari uraian permasalahan yang ada, penelitian ini ingin menegetahui Bagaimanakah Implemetasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara?"

METODE

Dasar penelitian kualitatif digunakan dalam peneliti ini. Penelitian kualitatif oleh Denzin & Lincoln adalah metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada objek yang alamiah untuk melihat fenomena yang ada dengan menggunakan berbagai metode. Kirk & Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang tergantung atas dasar pengamatan oleh manusia yang diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial (Anggito & Johan Setiawan, 2018). Berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian pada BRI Unit Cabang Parigi Toboli secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan pedoman dalam proses melakukan tindakan yang diinginkan. Menurut Anderson, kebijakan yaitu *“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with problem of matter of concern”* (Solichin Abdul Wahab, 2012). Dalam bukunya ia menjelaskan kebijakan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu aktor atau lebih terkait persoalan yang sedang dihadapi.

Menurut Friedrich, kebijakan merupakan tindakan yang disampaikan oleh perorangan, kelompok, hingga pemerintah yang memiliki peluang sekaligus hambatan dalam mewujudkan tujuan yang akan disepakati. Robert Eyestone, menurutnya, kebijakan publik merupakan hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan lingkungannya terkait penentuan dan pelaksanaan keputusan (Ravyansah dkk., 2022). Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah studi yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan bahwa sebaik-baiknya kebijakan publik jika tidak melalui persiapan dan perencanaan yang baik, maka pada implementasinya pun akan mengalami kegagalan (Faturrahman, M., 2016).

Selanjutnya Edward (1980) menjelaskan bahwa *“orders to implement policies must be transmitted to appropriate person, and they be clear accurate, and they must be clear accurate, and consistent.”* (Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya disampaikan kepada orang yang tepat, secara jelas, akurat, dan konsisten). Dalam membuat keputusan, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, dibutuhkan informasi melalui komunikasi yang tepat pula agar terhindar dari diskresi oleh implementor (Solichin Abdul Wahab, 2012).

Implementasi Kebijakan Model George Edwar III

Berhasil tidaknya suatu implementasi didasarkan atas empat (4) aspek yang memiliki peran penting. Aspek tersebut menurut Edwards III adalah *communication, resource, dispositions, dan bureaucratic structure*. Keempat faktor tersebut saling terkait dan

berhubungan untuk menentukan terlaksana atau tidaknya implementasi kebijakan. keempat faktor diuraikan sebagai berikut (Faturrahman, M., 2016) (Solichin Abdul Wahab, 2012):

a. Komunikasi

Dalam proses komunikasi ada 3 hal yang harus diperhatikan yakni: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Efektifnya pelaksanaan kebijakan salah satunya dilihat dari pemahaman terkait apa yang akan dilakukan. Keputusan dari kebijakan harus disampaikan secara akurat dan jelas, dalam hal ini transmisi sebagai salah satu unsur komunikasi yang terkait dengan penyaluran atau penyampaian informasi harus berjalan dengan baik.

Begitupun dengan kekonsistenan, diupayakan agar tidak terjadi keputusan yang bertentangan ataupun yang membingungkan untuk menghindari kebijakan yang tidak efektif. Tujuannya adalah untuk tidak menghasilkan kebingungan bagi pelaksanaan kebijakan, semisal interpretasi yang keliru sehingga terjadi kesalahan fatal dalam pelaksanaannya.

Kejelasan dipahami sebagai segala bentuk informasi yang disampaikan melalui komunikasi yang dapat dipahami dengan baik dan jelas.

b. Sumber daya

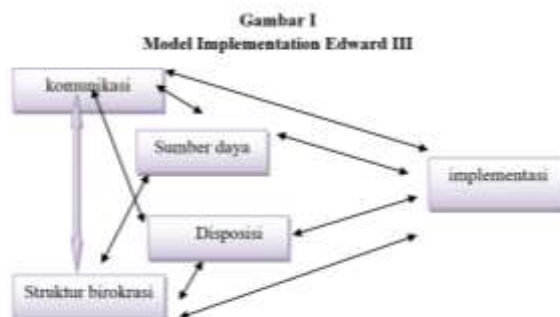
Manusia merupakan sumber daya utama dalam melaksanakan kebijakan publik, sumber daya manusia (SDM) ini terdiri dari staf/pegawai yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas. Selain itu dibutuhkan fasilitas berupa ketersediaan sarana fisik, termasuk ketersediaan ruangan yang memadai.

c. Disposisi

Dalam hal ini yang terkait dengan disposisi yakni sikap pelaksana kebijakan. Kecenderungan watak ataupun karakteristik seseorang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dengan sifat jujur yang dimiliki, memiliki komitmen, dan lebih demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah salah satu bagian dari organisasi yang memiliki alur proses pada suatu kebijakan. Ada 2 (dua) hal penting untuk diperhatikan dalam birokrasi, yakni prosedur kerja atau yang biasa dikenal dengan *standar operating procedures* (SOP) dan *fragmentasi* yang merupakan tanggung jawab kepada beberapa lembaga melalui koordinasi.



Sumber: Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik, 2019

Kawasan Tanpa Rokok di Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli Parigi

Rokok, tidak hanya membahayakan bagi yang mengisap zat kimia yang sifatnya racun tersebut. Tetapi juga akan berakibat fatal bagi siapa saja yang berada disekitar si perokok. Oleh karena itu mereka yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dikatakan perokok pasif (P2PTM Kemenkes RI, 2018). Setiap tahunnya pengkonsumsi rokok ini menyebabkan 3.000.000 orang mengalami kematian dini akibat menghisap tembakau. Hal ini menjadi pemicu munculnya penyakit kardiovaskular, yakni penyakit mematikan seperti stroke dan terjadinya serangan jantung. Penyakit tersebut menjadi pemicu terjadinya kematian utama yang ada di dunia (“Bahaya Rokok Bagi Kesehatan,” t.t.).

Di Parigi Mautong kebijakan KTR telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang KTR, pasal 2 disebutkan KTR terdiri dari:

- a. Fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan
- b. Tempat terjadinya proses pembelajaran
- c. Tempat anak-anak bermain
- d. Tempat melakukan ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat aktifitas kerja
- g. Tempat umum lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati, meliputi rumah makan/restoran, hotel, jasa boga, tempat wisata, dan sarana/vasilitas olahraga.

Terkait peraturan di atas, BRI Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara menerapkan kebijakan KTR. Dilakukan dengan memasang spanduk terkait penerapan kawasan tanpa rokok, juga satpam bank yang setiap hari kerja ikut memantau dan memberitahukan kepada nasabah yang hendak merokok di sekitar area Bank tersebut.

Dalam beberapa penelitian, hal negatif dari merokok selain berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan terhadap perokok dan orang yang mengisap rokok (perokok pasif), juga berdampak pada lingkungan hidup. Sisa rokok atau puntung rokok sering kali dibuang sembarangan oleh si perokok. Puntung rokok ini merupakan sampah yang tidak bisa terurai secara alami, bersifat racun, bahaya kebakaran, dan mengganggu kebersihan lingkungan.

Kawasan tidak merokok ini merupakan tempat dimana tidak ditemukan memproduksi, mengiklankan, menjual, dan aktifitas merokok lainnya. Tujuan dari terciptanya KTR sebagai kepedulian untuk menyediakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari zat berbahaya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga menghasilkan kualitas hidup bebas rokok untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (pemerintah Sulawesi Tengah, 2019) (*Kawasan Tanpa Rokok*, t.t.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bank Rakyat Indonesia Unit Toboli

Dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, terdapat beberapa alasan agar terlaksananya aturan tersebut, antara lain: melindungi masyarakat bukan perokok dari

paparan asap rokok, mencegah rasa ketidaknyamanan, menjauhkan dari bau asap rokok, dan KTR menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Ada 4 (empat) aspek utama dalam melihat dan mengetahui bagaimana Implementasi KTR BRI Unit Toboli sebagai berikut: (1) komunikasi terdiri dari (transmisi, kejelasan isi dan konsistensi kebijakan), (2) sumberdaya (ketersediaan staff, Informasi, kewenangan, fasilitas, (3) disposisi (pemahaman terhadap kebijakan, kapasitas Implementor, kehendak/motivasi implementor terhadap kebijakan, dan (4) struktur birokrasi dimensi indikator Standar Oprasional Prosedur dan *fragmentasi*.

Aspek Komunikasi

Komunikasi terkait dengan penyampaian pesan atau pemberian informasi kepada komunikan. Komunikasi yang disampaikan dengan baik dan tepat kepada penerima pesan akan mendapatkan respon yang baik juga. Mengkomunikasikan kebijakan dengan baik maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini, komunikasi terkait sosialisasi kebijakan KTR. BRI Unit cabang Toboli Parigi melakukan komunikasi berupa:

1. Sosialisasi pihak bank kepada nasabah yaterkait KTR
2. Pemantauan yang dilakukan oleh Satpam BRI
3. Terdapat beberapa slogan larangan merokok

Hasil wawancara dengan bapak I Ketut Martawan sebagai kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli: *“Saya sebagai kepala Bank disini selalu mengingatkan Satpam dengan tugas tugas nya yaitu salah satunya dengan larangan merokok ditempat kerja dan memantau para pengunjung Bank ini yang hendak merokok dan karyawan Bank juga mematuhi aturan di Bank ini”* (03/06/2022).

Berdasarkan pendapat informan diatas bahwa pelaksana kebijakan sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menyampaikan isi dari kebijakan dengan jelas. Pada dasarnya komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan KTR mudah dipahami oleh target kebijakan.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu satpam bank bapak Herman mengatakan: *“Kami pihak Bank telah menyampaikan beberapa tulisan dilarang merokok, area bebas asapa rokok tapi masyarakat disekitar sini masih kurang peduli akan tulisan tersebut.”* (03/06/2022)

Inilah yang menjadi penghambat sebab kurang responnya masyarakat, tidak adanya kesadaran, dan partisipasi dalam mensosialisasikan mengenai KTR kepada nasbah/masyarakat lainnya sehingga masih banyak yang tidak mengetahui. Upaya sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Bank, akan tetapi masyarakat sebagai pengunjung Bank masih kurang peduli atas himbauan tersebut. Masih ditemukan masyarakat yang merokok dan membuang puntung sembarangan.

Sumber daya

Dalam pengimplementasian kebijakan, hal utama yang harus ada adalah sumber daya. Termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas (sarana dan prasarana). Dari hasil penelitian terkait sumber daya dengan pelaksanaan implementasi kebijakan KTR di BRI terdapat faktor pendorong dan penghambat yakni:

1. Sumber daya manusia yang bekerja dengan baik untuk mentertibkan kawasan tanpa rokok di BRI.
2. Sosialisasi dari Satpam ke nasabah secara langsung.

Akan tetapi di bank tersebut tidak disediakan ruangan khusus untuk merokok, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penerapan aturan terkait KTR tidak berjalan sebagai mana mestinya.

“Kalau menurut pandangan saya secara pribadi sumber daya manusia sudah terpenuhi akan tetapi lebih baiknya lagi disiapkan ruangan khusus merokok dan juga kesadaran para pengunjung lain masih sangat kurang walaupun dari pihak satpam bank melakukan tugasnya namun belum membuahkan hasil. intinya pemahaman masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok sangat minim.” Hasil wawancara dengan bapak Taufik sebagai nasabah (03/06/2022)

Disposisi

Dalam proses pencapaian tujuan dari peraturan daerah terkait kawasan bebas rokok, Walikota melimpahkan wewenang kepada dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja dalam proses pengawasan berjalannya perda ini. Dinas kesehatan dalam hal ini bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya merokok ditempat umum, bahaya asap rokok terhadap orang lain. Satuan polisi pamong praja yang bertugas untuk mengawasi para pelanggar kebijakan yang merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.

Larangan pada KTR tidak hanya larangan untuk merokok, tapi juga mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sesuai ketetapan perda. Bagi pelanggar kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana baik yang merokok di KTR maupun yang memasarkan atau mempromosikan dan sebagainya dengan ketentuan pidana paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan perampasan barang bukti berupa alat promosi (pemerintah Sulawesi Tengah, 2019).

Struktur Birokrasi

Aspek selanjutnya yang sangat penting terkait implementasi KTR BRI Unit Toboli adalah struktur birokrasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan juga disiapkan *Standart Operating Procedure* (SOP). Pada aspek ini dibutuhkan sinergitas berbagai pihak yang memiliki peran/tugas yang telah ditentukan sebelumnya, di mana dalam struktur birokrasi ini memiliki pembagian kerja yang di koordinir oleh pimpinan.

Pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta SOP yang baik seharusnya mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, terstruktur, mudah dipahami sehingga menjadi acuan oleh implementor. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan KTR di BRI Unit Cabang Toboli, dalam implementasinya Bank mempunyai Satpam untuk menjalankan tugasnya, termasuk melakukan pemantauan dan melarang transaksi ketika mendapatkan pengunjung yang merokok dilingkungan bank.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara Nomor 2 Tahun 2015 belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh komunikasi dan sumberdaya. Dari aspek komunikasi yang cenderung satu arah saja dimana masyarakat kurang respon/peduli terhadap kebijakan KTR di tempat umum khususnya di bank BRI. Selain itu, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dari aspek sumber daya, penyebab kurang efektifnya implementasi kebijakan ini adalah dari segi sarana yang belum disediakannya tempat atau ruangan khusus merokok.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terkait implementasi kebijakan KTR di BRI unit cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi, perlu menciptakan komunikasi dua arah untuk memastikan kejelasan kebijakan KTR kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang insentif oleh pihak bank kepada nasabah atau masyarakat setempat untuk menyebarluaskan informasi terkait kawasan tanpa rokok. Bentuk komunikasi lainnya berupa sosialisasi *door to door*, pemasangan baliho, penyebaran selebaran dalam bentuk fisik ataupun online
2. Pada aspek sumberdaya, perlu adanya anggaran khusus untuk mendukung peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2015 kawasan tanpa rokok untuk memfasilitasi tersedianya ruangan khusus merokok.
3. Perlu adanya ketegasan pemerintah terkait peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 untuk memberikan denda langsung tunai bagi yang melanggar perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. (t.t.). *Rumah sakit Krakatau Medika*.
<https://krakataumedika.com/info-media/artikel/bahaya-rokok-bagi-kesehatan>
- Darsana, I. M., & Jayadi, U. (2022). Perspektif Pekerja Hotel Bintang Di Destinasi Wisata Sanur Terhadap Literasi Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 23-32.

- Faturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi*, 2(2).
- Kawasan Tanpa Rokok. (t.t.). komite nasional Pengendalian tembakau. <https://komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/>
- P2PTM Kemenkes RI. (2018). WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>
- Pemerintah Sulawesi Tengah. (2019). *PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH*. pemerintah Sulawesi Tengah. PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang ...<https://peraturan.bpk.go.id>
- Ravyansah, Sukarman Purba, & Bambang Irawan. (2022). *Kebijakan Publik* (1 ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan* (1 ed.). Paragonatama jaya.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. . (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i9.274>
- Wijaya, E. ., & Riswan, R. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Kap Dan Opini Audit Terhadap Opini Audit Going Concern. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1657–1668. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.218>

**IMPLEMETASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TOBOLI PARIGI
KECEMATAN PARIGI UTARA**

Gita Farista¹, Sinta²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.363>

ISSN 2809-8544

